



•••

# PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2021



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena atas izin-Nya Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 2021 dapat diselesaikan. Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan dan pertanggung jawaban PPID Pelaksana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi pada Tahun 2021.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung sebagai badan publik melalui PPID telah menyediakan akses informasi tentang program dan kinerja perencanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung. Hal tersebut sesuai dengan amanat keterbukaan informasi sebagaimana Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menuntut Badan Publik untuk membuka akses sebesar-besarnya dalam memberikan pelayanan informasi yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Laporan ini menggambarkan pengalolaan dan pelayanan informasi di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung melalui <https://www.disnakkeswan.lampungprov.go.id> dan akun-akun media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube. Hal ini merupakan sarana penyediaan informasi PPID Pelaksana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung selain penyediaan informasi melalui akses layanan langsung pada desk/meja layanan. PPID Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk terus memperbaiki kinerja dalam rangka mendorong implementasi keterbukaan informasi publik dengan menerima masukan dan saran terkait dengan peningkatan dan perbaikan pelayanan untuk masa yang akan datang.

Bandar Lampung, 17 Maret 2022

Selaku Atasan PPID Pelaksana  
Kepala Dinas Peternakan dan  
Kesehatan Hewan Provinsi Lampung,



**H. Lili Mawarti, M.Si**  
Pemangia Tingkat I  
NIP. 19670426 199203 2 003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	iv
<b>BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b> .....	1
<b>A. Dasar Hukum PPID</b> .....	1
<b>B. Tugas dan Fungsi PPID</b> .....	2
<b>C. Maklumat Layanan Informasi Publik</b> .....	2
<b>D. Azas Pelayanan Informasi Publik</b> .....	3
<b>E. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik</b> .....	5
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b> .....	7
<b>A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik</b> .....	7
<b>B. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik</b> .....	8
<b>C. Anggaran Layanan Informasi Publik</b> .....	8
<b>BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b> .....	9
<b>A. Mekanisme Layanan Informasi Publik</b> .....	9
<b>B. Kategori Informasi Publik</b> .....	10
<b>C. Kategori Informasi yang Dikecualikan</b> .....	10
<b>D. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi</b> .....	11
1. Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan .....	11
2. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak dan Alasannya .....	17
<b>E. MONEV KIP 2020</b> .....	17
<b>F. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik</b> .....	17
1. Website .....	17
2. Media Sosial .....	18
3. Papan Informasi .....	19
<b>G. Kendala Layanan Informasi Publik</b> .....	20
1. Internal .....	20
2. Eksternal .....	20
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	21
<b>A. Kesimpulan</b> .....	21
<b>B. Saran</b> .....	21

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan (SK) PPID Pelaksana .....	22
2. Struktur Organisasi PPID Pelaksana .....	25
3. Foto dan Dokumentasi .....	26
4. SPT Admin PPID Pelaksana .....	27

# **BAB I**

## **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### **A. Dasar Hukum PPID**

Dasar Hukum pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung; dan
9. Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Nomor 188/122.a/V.23/A.3/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 2021.

## **B. Tugas dan Fungsi PPID**

PPID Pelaksana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung mempunyai tugas secara umum yaitu merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung. Tugas PPID Pelaksana adalah sebagai berikut:

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membuat pengumpulan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
3. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
4. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama Provinsi Lampung secara berkala dan sesuai kebutuhan;
5. Membantu PPID Utama Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya; dan
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama Provinsi Lampung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

Fungsi PPID Pelaksana pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Penghimpunan informasi publik dari seluruh bidang dan UPTD di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung;
2. Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh bidang dan UPTD di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung;
3. Pelaksanaan konsultasi informasi publik termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik; dan
4. Pendampingan penyelesaian sengketa informasi.

## **C. Maklumat Layanan Informasi Publik**

Maklumat Pelayanan Informasi Publik telah ditetapkan yaitu pernyataan komitmen dari segenap elemen/unsur PPID pelaksana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung untuk melaksanakan keterbukaan Informasi Publik dengan memberikan pelayanan informasi Publik yang sebaik-baiknya melalui media informasi dan komunikasi yang tersedia

sesuai dengan standar layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.

Maklumat Pelayanan Informasi Publik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, yaitu:

*“Dengan ini, kami berjanji sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan serta bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar yang ditetapkan.”*



Gambar 1. Maklumat Pelayanan

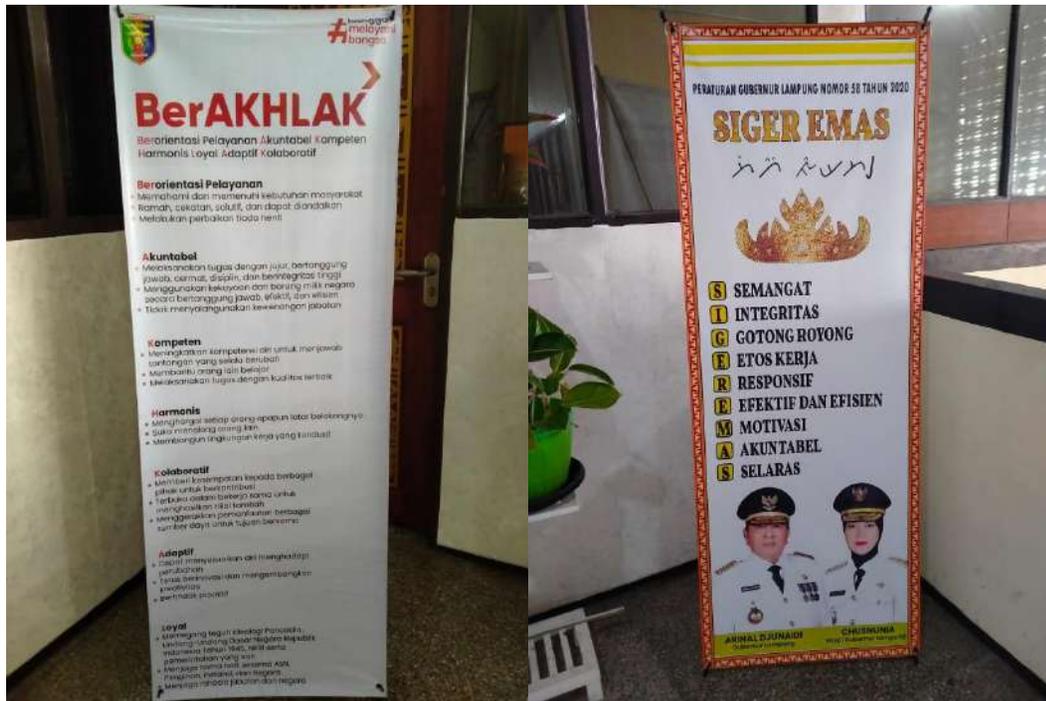
Untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan dan pengelolaan layanan Informasi Publik di Lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung maka telah ditetapkan standar operasional prosedur pelayanan Informasi Publik berdasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

#### **D. Azas Pelayanan Informasi Publik**

Azas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung mengacu pada *core values* ASN yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo pada tanggal 27 juli 2021 yaitu “BerAKHLAK”. BerAKHLAK merupakan singkatan dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis,

Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. *Core values* BerAKHLAK memiliki penjabaran lebih rinci yaitu:

1. **Berorientasi Pelayanan:**
  - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
  - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
  - Melakukan perbaikan tiada henti
2. **Akuntabel:**
  - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat disiplin, dan berintegritas tinggi
  - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien
  - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
3. **Kompeten:**
  - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
  - Membantu orang lain belajar
  - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
4. **Harmonis:**
  - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
  - Suka menolong orang lain
  - Membangun lingkungan kerja yang kondusif
5. **Loyal:**
  - Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD RI 1945, setia kepada NKRI serta Pemerintahan yang sah
  - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara
  - Menjaga rahasia jabatan dan negara
6. **Adaptif:**
  - Cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan
  - Terus berinovasi dan mengembangkan kreatifitas
  - Bertindak proaktif
7. **Kolaboratif:**
  - Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
  - Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah
  - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan Bersama



Gambar 2. BerAkhlaK

Gambar 3. SIGER EMAS

Selain itu, Azas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung juga mengacu pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 58 Tahun 2020 dengan *tagline* “SIGER EMAS” yaitu:

- |                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>Semangat</b>      | <b>Efektif dan Efisien</b> |
| <b>Integritas</b>    | <b>Motivasi</b>            |
| <b>Gotong Royong</b> | <b>Akuntabel</b>           |
| <b>Etos Kerja</b>    | <b>Selaras</b>             |
| <b>Responsif</b>     |                            |

### E. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik

Setiap instansi publik mempunyai kewajiban membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik untuk masyarakat. Sesuai amanat pasal 13 Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung sebagai salah satu badan publik telah membentuk Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dengan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Pelaksana. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh petugas pelayanan informasi pada desk layanan informasi Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Provinsi Lampung. Susunan Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Struktur Organisasi PPID Pelaksana Disnakkeswan

Dengan dibentuknya PPID Pelaksana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, maka Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dilakukan secara terpadu oleh PPID Pelaksana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang terdiri dari pejabat struktural dan JFU pada unit kerja/bidang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang termuat dalam SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Nomor:188/122.a/V.23/A.3/2021. Secara struktural, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung memegang kendali sebagai Atasan PPID dan Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung sebagai Ketua PPID. Selengkapnya, struktur organisasi PPID Pelaksana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dapat dilihat pada Gambar 4 di atas.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana layanan informasi publik yang ada pada PPID Pelaksana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung tahun 2021 yaitu:

1. Meja dan kursi pelayanan;



Gambar 5. Tempat pelayanan informasi

2. xBanner;
3. Layanan akses internet;
4. Thermometer;



Gambar 6. Termometer Stand

5. Papan pengumuman;
6. Running text;



Gambar 7. Running text untuk informasi harga produk peternakan

## B. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik

Sumber daya manusia pengelola informasi publik yang menangani pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Nomor 188/122.a/V.23/A.3/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PPID Pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Atasan PPID: Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung;
2. Ketua PPID: Sekretaris;
3. Sekretaris PPID: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
4. Koordinator Pengelola Data dan Informasi: Kepala Sub Bagian Perencanaan;
5. 2 Orang Anggota Pengelola Data dan Informasi;
6. Koordinator Pelayanan Dokumentasi: Mahbub Abdul Fatah, S.Pt., MM;
7. 9 Orang Anggota Pelayanan Dokumentasi.

## C. Anggaran Layanan Informasi Publik

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung belum mengalokasikan untuk PPID secara khusus, namun pelayanan informasi secara umum dibebankan pada sub-kegiatan "Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor" pada DPA SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.

## BAB III

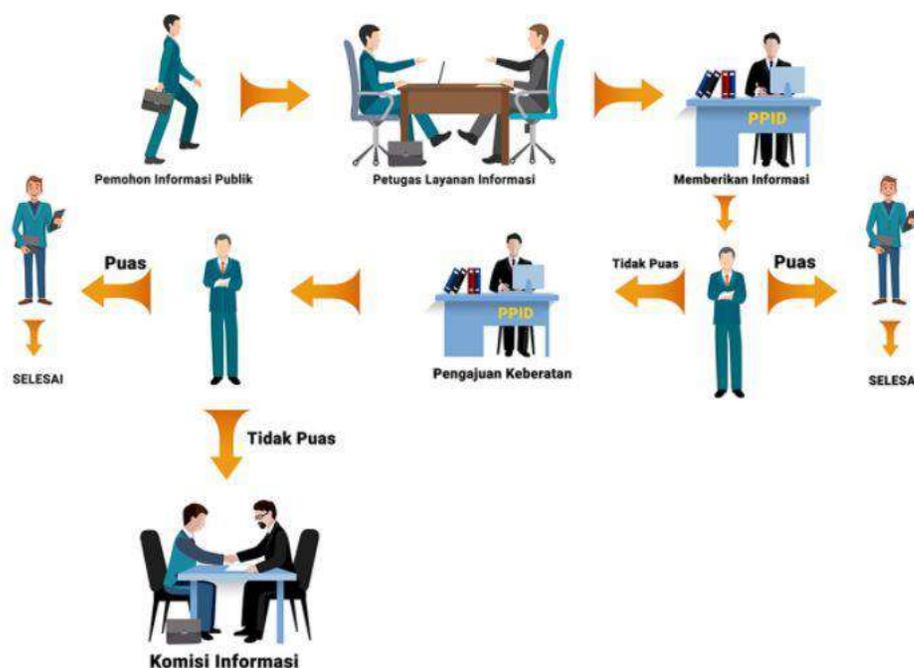
### PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### A. Mekanisme Layanan Informasi Publik

Mekanisme layanan informasi publik pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Pemohon informasi datang ke Desk Layanan Informasi dan mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotokopi KTP pemohon dan pengguna informasi.
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
4. Petugas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon. Apabila informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, maka PPID dapat menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik.

Adapun standar pelayanan informasi publik dapat dilihat dari gambar sebagai berikut:



Gambar 8. Mekanisme Layanan Informasi Publik

## B. Kategori Informasi Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjelaskan dasar pelaksanaan keterbukaan informasi publik yaitu dengan memberikan informasi berdasarkan kategori informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat yang terdiri dari informasi yang wajib diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia yang setiap saat dapat diakses oleh publik.

Kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh bidang dan UPTD di Lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang dalam hal ini tidak masuk dalam kategori dikecualikan. Informasi diumumkan melalui *website* dan media sosial (*Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube*) milik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.

Kategori informasi yang wajib tersedia yang setiap saat dapat diakses oleh publik antara lain adalah: visi dan misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, lokasi dan kontak, IKU (Indikator Kinerja Utama), dan rencana strategis. Semua informasi tersebut dapat diakses pada *website* milik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.

## C. Kategori Informasi yang Dikecualikan

Setiap badan publik wajib membuka akses Informasi Publik bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Yang termasuk kategori informasi yang dikecualikan yaitu:

1. Menghambat proses penegakan hukum;
2. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
5. Merugikan ketahanan ekonomi nasional;

6. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
7. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
8. Mengungkap rahasia pribadi seseorang;
9. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
10. Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Selama tahun 2021, PPID Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung tidak menerima satupun permintaan informasi yang masuk dalam kategori dikecualikan.

#### **D. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi**

Selama tahun 2021, PPID di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung menerima 130 (Seratus Tiga Puluh) permohonan informasi yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat, antara lain:

1. Warga Masyarakat
2. Mahasiswa/Akademisi
3. Professional
4. Perusahaan
5. Badan Publik
6. Kelompok Tani/Ternak

Dari 130 permohonan informasi ini diajukan secara langsung kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung bukan melalui desk resmi PPID Utama.

##### **1. Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan**

Permintaan Informasi publik di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 2021 sebanyak 130 permintaan pada intinya semua dikabulkan, karena informasi yang diminta oleh pemohon bukan merupakan informasi yang dikecualikan.

Rincian permohonan informasi publik yang diajukan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 2021 secara lengkap dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 1. Permohonan Data dan Informasi yang Dikabulkan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 2021

No	Tanggal	Nomor Surat	Perihal	Pemohon	TL
1	5 Jan	524/01/V23/01/2020	Laporan Pengaduan	Warga Pkn. Banjarmasin Kab. Tanggamus	Bitpro
2	6 Jan	800/04/V23/04/2021	Permohonan Tempat PSE	SMK Muhammadiyah Way Sulan	Umum
3	7 Jan	900/0022/VI.02/2021	Permintaan Data Hibah dan Bantuan Sosial Th. 2021	Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Keuangan
4	12 Jan	001/ID.CPILamp/-/1/2021	Permohonan Pengambilan Contoh Pakan yang Akan Diuji	PT. Charoen Pokphand Indonesia Feedmill	PSP
5	12 Jan	524/17/V23/01/2021	Permohonan Pengambilan Contoh Pakan	PT. Japfa Comfeed Indonesia	PSP
6	14 Jan	11004/PW.200/F1/01/2021	Permintaan Person in Charge (PIC) Monev Tahun 2021	Ditjen PKH, Kementerian Pertanian	Perencanaan
7	18 Jan	522/0024/V24/2021	Dukungan Pengembangan Perhutanan Sosial	Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Perencanaan
8	19 Jan	004/SP.Prop/KPTRGMS/TB/I/2021	Permohonan Bantuan Ternak Sapi	KPTR Gla Mandiri	Bitpro
9	19 Jan	800/93/VI.04/2021	Permintaan Data ASN di Lingkungan Pemprov Lampung	BKD Provinsi Lampung	Sekretariat
10	25 Jan	524/37/V23/01/2021	Permintaan Data Perusahaan Peternakan di Lampung	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	BUP
11	28 Jan	524/49/V23/01/2021	Permohonan Informasi Daftar Harga Sapot & Bibit S. Bali	Dinas Ketahanan Pangan & Keswan Riau	BUP
12	1 Feb	002/ID.CPI/NKV-IKPH/I/2021	Permohonan Penerbitan NKV untuk Instalasi Karantina	PT. Charoen Pokphand	Keswan
13	4 Feb	800/57/V.16/2021	Permintaan Anggota Tim Teknis pada Dinas PMPTSP	Dinas Penanaman Modal PTSP Lampung	Umum
14	5 Feb	045/0375/05/2021	Permintaan Data Pemegang Sertifikat Tingkat Dasar PBJ	Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretariat
15	5 Feb	520/50/V.16/2021	Pendapat Teknis Izin Pemasukan Daging Olahan	Dinas Penanaman Modal PTSP Lampung	Keswan
16	5 Feb	120/0347/V.14-6/2021	Permintaan Data Pembangunan Tahun 2020	Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretariat
17	9 Feb	524/06/0.9/4.3/2021	Permohonan Nomor Kontrol Veteriner	UPTD Rumah Potong Hewan	Keswan
18	10 Feb	524/85/V23/02/2021	Permohonan Wawancara	Portal Berita mongabay.co.id	UPTD PTKS
19	11 Feb	085/VI/DP/VI.09/2021	Permohonan Data ASN yang Belum Memiliki Rumah	KORP Pegawai Dewan Pengurus Lampung	Umum
20	15 Feb	002/PI/SMKNBM/1.04/KM/11/2021	Permohonan Peserta Praktik Industri	SMKN 1 Bunga Mayang Lampung Utara	Umum
21	17 Feb	500/0608/04/2021	Permintaan Program Kerja TPID Provinsi Lampung 2021	Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretariat
22	22 Feb	520/79/Bid.B/V.16/2021	Pendapat Teknis Pengeluaran Daging Ayam Beku	Dinas Penanaman Modal PTSP Lampung	Keswan
23	26 Feb	900/118/V23/02/2021	Pendapat Teknis Izin Pemasukan Daging Sapi Beku	Dinas Penanaman Modal PTSP Lampung	Keswan
24	5 Mar	03139/KU.050/F/03/2021	Permintaan Data Calon Debitur KUR Potensial	Ditjen PKH, Kementerian Pertanian	BUP
25	8 Mar	044/Mg-MBK/FISIP-UBL/III/2021	Permohonan Magang	Universitas Bandar Lampung	Umum
26	10 Mar	001/SMTS-LPG/YAMIKU/III/2021	Permohonan Surat Rekom NKV pada Kios YAMIKU	PT. Sarana Mitratama Sejati	Keswan
27	10 Mar	08007/TU.020/F51/03/2021	Permohonan Narasumber	BBPM dan Sertifikasi Obat Hewan	Keswan

28	16 Mar	800/172/V23/03/21	Permohonan Wawancara	a.n. Chairul Rahman Arif	PSP
29	17 Mar	524/539/D-9/04/2021	Permintaan Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner	Dinas KPTP Kota Metro	Keswan
30	17 Mar	524/162/IV.05/III/2021	Permohonan Permintaan Vaksin Rabies	Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran	Keswan
31	18 Mar	524/317/IV.23/2021	Permohonan Narasumber	Dinas Peternakan dan Keswan Lamsel	BUP
32	23 Mar	001/KaryaMufakat/PLB/III/21	Permohonan Bantuan Ternak Sapi	Kelompok Tani Karya Mufakat	Bitpro
33	23 Mar	001/MekarSaril/III/21	Permohonan Bantuan Ternak Sapi	Kelompok Tani Mekar Sari II	Bitpro
34	23 Mar	001/PodoElingIII/HT/21	Permohonan Bantuan Ternak Sapi	Kelompok Tani Podo Eling III	Bitpro
35	29 Mar	0382/UNS.FMIPA/TU.KT/2021	Permohonan Izin Kerja Praktek	FMIPA Universitas Srawijaya	UPTD BIB
36	29 Mar	141/KTMB/035/2006/2021	Permohonan Pengadaan Kambing	Kube Berkah Harapan Tani Lamtim	Bitpro
37	29 Mar	141/KTMB/035/2006/2021	Permohonan Pengadaan Mesin Cacad Pakan	Kube Berkah Harapan Tani Lamtim	Bitpro
38	29 Mar	141/KTMB/035/2006/2021	Permohonan Pengadaan Sapi	Kube Berkah Garuda Lamtim	Bitpro
39	29 Mar	141/KTMB/035/2006/2021	Permohonan Pengadaan Sapi	Kube Sumber Makmur Lamtim	Bitpro
40	30 Mar	524/222/V23/03/2021	Permohonan Data Penelitian	Universitas Lampung	UPTD PTKS
41	31 Mar	076/HRGA-SP/CJFL/III/2021	Permohonan Pengambilan Sampel Pakan	PT. Cheil Jedang Feed Lampung	PSP
42	5 Apr	001/MD/LBF2/04/2021	Permohonan Sebagai Saksi Afkir PS	PT. Malindo Feedmill, Tbk	Bitpro
43	7 Apr	520/166/Bid.B/V.16/2021	Pendapat Teknis Izin Pemasukan PT. Eka Bogainti	Dinas Penanaman Modal PTSP Lampung	Keswan
44	7 Apr	520/167/Bid.B/V.16/2021	Pendapat Teknis Izin Pemasukan PT. Multirasa Nusantara	Dinas Penanaman Modal PTSP Lampung	Keswan
45	14 Apr	520/187/Bid.B/V.16/2021	Pendapat Teknis Pengeluaran & Pemasukan Produk Hewan	Dinas Penanaman Modal PTSP Lampung	Keswan
46	14 Apr	14020/TI040/F/04/2021	Permintaan Data Ketersediaan Hewan Kurban Tahun 2021	Ditjen PKH, Kementerian Pertanian	BUP
47	15 Apr	500/249/WR.UP/EKS/III/2021	Permohonan Audiensi	PT. Wahana Raharja	Umum
48	16 Apr	B.01/10/TU.020/F5/04/2021	Permohonan Data Unit Usaha Sarang Burung Walet	Ditjen PKH, Kementerian Pertanian	Keswan
49	19 Apr	140/ /VII.07.09/III/2021	Permohonan Bantuan Pengembangan Usaha Kambing	Kecamatan Punduh Pedada	Bitpro
50	19 Apr	03/KT-SinarJaya/I/2021	Permohonan Bantuan Pengembangan Usaha Sapi	Kec. Way Khilau, Pemkab Pesawaran	Bitpro
51	19 Apr	002/KT-L/VI/2020	Permohonan Bantuan Modal Usaha Ternak Sapi	Kelompok Tani Ranting Jaya	Bitpro
52	19 Apr	410/007/V.I.17/2021	Permohonan Bantuan Ternak Kambing	Kec. Gedong Tataan Pemkab Pesawaran	Bitpro
53	20 Apr	S-1474/DTPHP-2.1/IV/2021	Permintaan Kuota Pengiriman Sapi dari Prov Lampung	Dinas TPHP Provinsi Jambi	Keswan+Bitpro
54	22 Apr	14020/TI.040/F/04/2021	Permintaan Data Ketersediaan Hewan Kurban TA 2021	Ditjen PKH, Kementerian Pertanian	Keswan+Bitpro
55	23 Apr	520/193/Bid.B/V.16/2021	Pendapat Teknis Pengeluaran Daging Babi Beku	Dinas Penanaman Modal PTSP Lampung	Bitpro

56	28 Apr	2142/JOI-I-25/PASCA/2021	Permohonan Izin Penelitian	Universitas Gadjah Mada	Bitpro
57	28 Apr	002/KL-TM/LD/II/2021	Permohonan Bantuan Ternak Sapi	Kelompok Tani Tanjung Mulia	Sekretariat
58	28 Apr	001/KL-SD/LD/II/2021	Permohonan Bantuan Ternak Kambing	Kelompok Tani Sido Dadi	Sekretariat
59	3 Mei	S-141/WPJ.28/2021	Permintaan Data Produktivitas Peternakan	Ditjen Pajak Bengkulu Lampung, Kemenkeu	Sekretariat
60	4 Mei	005/1734/04/2021	Permohonan Uji Sampling Pada Sidak Pasar	Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Keswan
61	7 Mei	07/KTKM/IV/2020	Permohonan Bantuan Itik	Kelompok Tani Karya Mandiri	Bitpro
62	31 Mei	B-032/18511/HM.360/05/2021	Permintaan Narahubung Rilis Data dan Informasi BPS	BPS Provinsi Lampung	Perencanaan
63	31 Mei	B-31004/TI.040/F2.2/05/2021	Permintaan Data Populasi Ternak di UPTD Perbibitan	Ditjen PKH, Kementerian Pertanian	UPTD PTS
64	31 Mei	005/17/KT-JM/V/2021	Permohonan Bantuan Proposal Bantuan Sapi	Kelompok Tani Jatimak Makmur	Bitpro
65	31 Mei	524/97/D.a.IV.24/2021	Permohonan E-Proposal Termin IV TA. 2021	Dinas Peternakan & Perkebunan Lamteng	Perencanaan
66	2 Jun	B.31012/PK.310/F5.C/05/21	Permohonan SK Petugas Gangrep & Kesehatan Pedet 2021	Balai Veteriner Lampung	Keswan
67	2 Jun	524/660/IV.23/2021	Permohonan Sertifikasi NKV Gudang IKPH PT Japfa Com	Dinas Peternakan & Keswan Lamsel	Keswan
68	2 Jun	524/658/IV.23/2021	Permohonan Sertifikasi NKV Gudang IKPH PT CPB	Dinas Peternakan & Keswan Lamsel	Keswan
69	2 Jun	524/659/IV.23/2021	Permohonan Sertifikasi NKV Gudang IKPH PT CJ Feedmill	Dinas Peternakan & Keswan Lamsel	Keswan
70	3 Jun	001/TJAIL_BJG/VII/20	Permohonan Bantuan Ternak Sapi Potong	Kelompok Tani Jaya Abadi II Lamtim	Bitpro
71	8 Jun	001/MD/L13F2/06/2021	Permohonan Sebagai Saksi Afkir PS	PT Malindo Feedmill	Bitpro
72	14 Jun	524/708/IV.23/2021	Permohonan Sertifikasi NKV Gudang IKPH PT New Hope	Dinas Peternakan & Keswan Lamsel	Keswan
73	14 Jun	524/346/V23/06/2021	Pengaduan dan Keluhan Babi dari Bali & Jatim ke Lampung	Perwakilan Peternak Babi Lamteng	Keswan
74	15 Jun	524/347/V23/06/2021	Permohonan Bantuan Terak Sapi	Kelompok Tani Rukun IV	Bitpro
75	15 Jun	524/348/V23/06/2021	Permohonan Bantuan Terak Sapi	Kelompok Tani Panca Guna	Bitpro
76	15 Jun	524/349/V23/06/2021	Permohonan Bantuan Terak Sapi	Kelompok Tani Mataram Jaya	Bitpro
77	15 Jun	524/350/V23/06/2021	Permohonan Bantuan Terak Sapi	Kelompok Tani Sejahtera	Bitpro
78	21 Jun	069/00708.ME5/2021	Permohonan Kerjasama Bisnis Melalui Sinergi Korporasi	PT Pegadaian Persero	Umum
79	21 Jun	B-18003/TI.040/F2.3/06/2021	Permintaan Data Potensi Ketersediaan Ternak Kurban 2021	Ditjen PKH, Kementerian Pertanian	Bitpro+BUP
80	28 Jun	524/391/V23/06/2021	Permohonan Praktik Kerja Lapangan	FTIK Universitas Teknokrat Indonesia	Umum
81	28 Jun	524/393/V23/06/2021	Permohonan Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner	Dinas KPPP Kota Metro	Keswan
82	5 Jul	001/312/DC-BDL/2021	Permohonan Surat Rekomendasi Pemasukan Daging	MCD Antasari Lampung	Keswan
83	5 Jul	524/407/V23/07/2021	Permohonan Sebagai Saksi Afkir PS	PT Malindo Feedmill Breeder Farm I	Bitpro

84	14 Jul	520/327/Bid.B/V.16/2021	Pendapat Teknis Izin Pemasukan Pangan PT Havi Indonesia	Dinas Penanaman Modal PTSP Lampung	Keswan
85	15 Jul	2963/UN26.14/TU.00.00/21	Permohonan Izin Praktik Umum	FP UNILA	UPTD PTKS
86	23 Jul	524/425/V23/07/2021	Permohonan Sertifikasi NKV untuk Gedung IKPH	Dinas Peternakan dan Keswan Lamsel	Keswan
87	27 Jul	524/431/V23/07/2021	Permintaan Counterpart	Pengurus Besar ISPI Indonesia	BUP
88	28 Jul	011/NHI-L/QC&QA/VII/2021	Permintaan Pengambilan Sampel untuk Uji Sertifikasi	PT New Hope Indonesia Animal Feed	PSP
89	30 Jul	520/335/Bid.B/V.16/2021	Pendapat Teknis Rekomendasi Pemasukan Semen Beku	Dinas Penanaman Modal PTSP Lampung	Bitpro
90	12 Agu	B-2757/KP.020/A/08/2021	Permintaan Data Usul Kebutuhan PPK	Kementerian Pertanian	Sekretariat
91	16 Agu	B.1022/KR.120/K.32.C/08/2021	Permohonan Data	Balai Karantina Pertanian Kls II Cilegon	Keswan
92	18 Agu	524/459/V23/08/2021	Permohonan Proposal Bantuan Ternak Kambing	Kelompok Sido Makmur	Bitpro
93	24 Agu	524/463/V23/08/2021	Permohonan Pengambilan Contoh Pakan	PT Japfa	PSP
94	25 Agu	500/2959/04/2021	Permintaan Data LVC dan Indikator Ekonomi Daerah	Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretariat
95	1 Sep	31004/PI.130/F3.A/08/2021	Permohonan Informasi Ketersediaan & Harga Sapi Indukan	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan	BUP
96	2 Sep	520/380/Bid.B/V.16/2021	Pendapat Teknis Izin Pemasukan Pangan PT PAL	Dinas Penanaman Modal PTSP Lampung	Keswan
97	2 Sep	520/377/Bid.B/V.16/2021	Pendapat Teknis Izin Pemasukan Pangan PT Eka Bogainti	Dinas Penanaman Modal PTSP Lampung	Keswan
98	2 Sep	520/379/Bid.B/V.16/2021	Pendapat Teknis Izin Pemasukan Pangan PT RNF & Havi	Dinas Penanaman Modal PTSP Lampung	Keswan
99	2 Sep	060/MF/LBF1/08/2021	Permohonan Sebagai Saksi Afkir PS	PT Malindo Feedmill Tbk	Bitpro
100	3 Sep	524/1065/IV.23/2021	Permohonan Sertifikasi NKV Gudang IKPH PT Suri Tani P.	Dinas Peternakan dan Keswan Lamsel	Keswan
101	17 Sep	524/519/V23/09/2021	Permohonan Penanganan Gangguan Lingk. dari Peternakan	Desa Gedung Harapan Lampung Selatan	Keswan+BUP
102	23 Sep	524/177/D.a.VI.24/2021	Permohonan Bantuan Vaksin Rabies	Dinas Peternakan & Perkebunan Lamteng	Keswan
103	23 Sep	524/1572.A/D-9/04/2021	Permohonan Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner	Dinas KPPP Kota Metro	Keswan
104	27 Sep	12339/TU.640/K.14/BL9/2021	Permohonan Data Analisis Resiko Pemasukan Sapi Impor	Balai Karantina Pertanian Kelas I BDL	BUP
105	6 Okt	003/017/SBF/IX/2021	Permohonan Rekomendasi NKV Level 1	Suhita Bee Farm	Keswan
106	8 Okt	524/1238/IV.23/2021	Permohonan Surveilans NKV	Dinas Peternakan dan Keswan Lamsel	Keswan
107	17 Okt	017/B/HIMAPET/KBM/FP_UL/X/21	Permohonan Pemateri	HIMAPET FP UNILA	Sekretariat
108	21 Okt	B-097/BPS/18550/10/2021	Permintaan Data Indikator Ekonomi Regional TW III 2021	Badan Pusat Statistik	Perencanaan
109	21 Okt	005/Eks/CJFnC/HRGA/X/2021	Permohonan Pergantian Nama Unit Usaha Sertifikat NKV	PT CJ Feed and Care Indo	Keswan
110	21 Okt	140/048/01.69/2021	Permohonan Bantuan Kambing	Kepala Pekon Sukamana Kab. Tanggamus	Bitpro
111	21 Okt	03/KUB-A/X/2021	Permohonan Bantuan Kambing	Kepala Pekon Antar Brak Kab. Tanggamus	Bitpro

112	22 Okt	001/LD-PT.CPILampung/X/2021	Permohonan Pengambilan Contoh Pakan yang Akan Diuji	PT Charoen Pokphand Feedmill Lampung	PSP
113	26 Okt	014/IKL/ST/X/2021	Permohonan Menjadi Narasumber	Saburai TV	BUP
114	26 Okt	900/3656/VI.02/2021	Permintaan Data Belanja dan APBD-P TA 2021	Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretariat
115	29 Okt	01/KWT-M/RB/X/2021	Permohonan Bantuan Home Industry	KWT Melati Lampung Tengah	BUP
116	29 Okt	010/KUBE-PMUJ/IX/2021	Permohonan Pembangunan Rumah Potong Hewan	Pemuda Mandiri Utama Lampung Tengah	Keswan
117	29 Okt	01/KWT-A/RG/X/2021	Permohonan Bantuan Home Industry	KWT Anggrek Lampung Tengah	BUP
118	4 Nov	086/MF/LBF1/11/2021	Permohonan Sebagai Saksi Afkir PS	PT Malindo Feedmill, Tbk	Bitpro
119	10 Nov	524/164/11.22/TUBABA/2021	Permintaan Alokasi Peserta AUTS/K Tahun 2022	Dinas Peternakan dan Keswan Tubaba	BUP
120	11 Nov	15032/TU.020/F/10/2021	Permohonan Perjanjian Kontrak THL drh dan Paramedik Vet	Dinas Peternakan dan Keswan Lamtim	Sekretariat
121	15 Nov	22/SP/CJFnC-Lpg/Hrga/XI/2021	Permohonan Pengambilan Sampel Pakan	PT CJ Feed an Care Indonesia	PSP
122	16 Nov	524/631/V23/11/2021	Permohonan Perjanjian Kontrak THL drh dan Paramedik Vet	Dinas Peternakan dan Keswan Tubaba	Sekretariat
123	17 Nov	026/B/Himapet/KBM/FP-UL/XI/21	Permohonan Partisipasi Dalam Video Persembahan	HIMAPET FP UNILA	Sekretariat
124	23 Nov	B-22002/TU.020/F.23/11/21	Permintaan Data Ketersediaan Sapi Potong	Dir. Bitpro, Ditjen PKH, Kementan	Perencanaan
125	23 Nov	B-23005/TU.020/F.23/11/21	Permintaan Data Ketersediaan Sapi/Kerbau Lokal	Dir. Bitpro, Ditjen PKH, Kementan	Bitpro
126	24 Nov	B-1113/PW.030/B.1/11/2021	Permintaan Dokumen Pemeriksaan Laporan Keuangan	Ditjen PSP, Kementan	Keu+PSP
127	30 Nov	140/354/Kc.a/III.08.07/2021	Permohonan Perbanyak Populasi Kambing u/ Prod. Kompos	Kampung Sendang Asri	Bitpro
128	30 Nov	01/KT-SK/11/2021	Permohonan Pengembangan Ternak Kambing	Kelompok Tani Suka Maju Lamteng	Bitpro
129	20 Des	045/AAB/XII/2021	Permohonan Wawancara dan Pengambilan Data	PT Aksioma Amerta	BUP
130	27 Des	21399/KU.140/F1/12/2021	Permintaan Data Realisasi Keuangan dan Fisik	Ditjen PKH, Kementerian Pertanian	Perencanaan

## 2. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak dan Alasannya

Sepanjang tahun 2021 semua permohonan informasi publik tidak ada yang ditolak oleh PPID Pelaksana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung karena informasi yang diminta oleh pemohon bukan merupakan informasi yang dikecualikan.

## E. MONEV KIP 2020

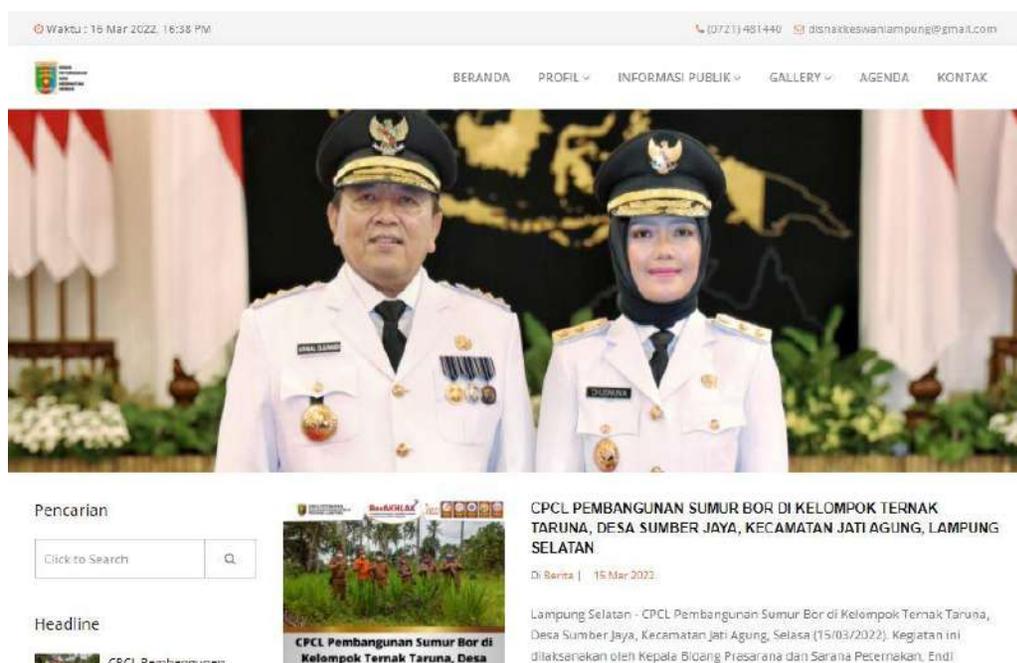
Monev KIP pada tahun 2020 tidak secara langsung dilaksanakan di PPID Pelaksana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung. Hasil monev pada tahun 2020 menjadikan Provinsi Lampung mendapat predikat “menuju informatif” di Tahun 2021.

## F. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik

Sarana penunjang layanan informasi publik pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung antara lain adalah website, media sosial, dan papan informasi.

### 1. Website

Website Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yaitu [disnakeswan.lampungprov.go.id](http://disnakeswan.lampungprov.go.id) menyajikan informasi serta kegiatan dari seluruh bidang dan UPTD di Lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.



Gambar 9. Tampilan Website Disnakeswan

2. Media Sosial

Selain melalui website, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media sosial yang terdiri dari:

1. Facebook ([facebook.com/disnakkeswanlampung](https://facebook.com/disnakkeswanlampung))



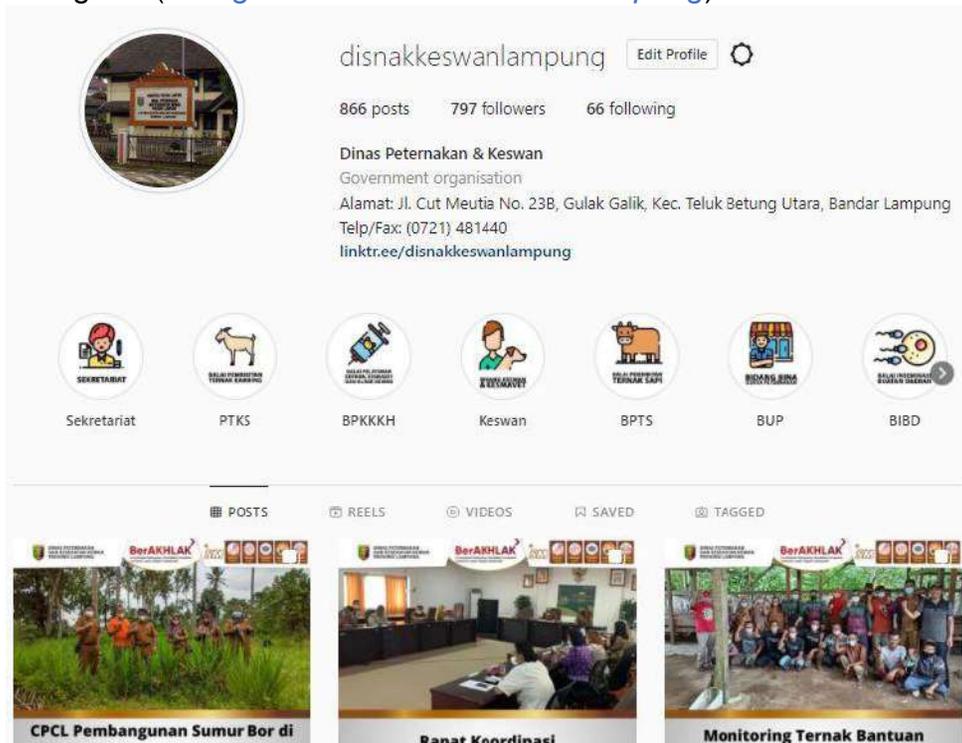
Gambar 10. Tampilan Facebook Disnakkeswan

2. Twitter ([twitter.com/disnakkeswanlpg](https://twitter.com/disnakkeswanlpg))



Gambar 11. Tampilan Twitter Disnakkeswan

3. Instagram ([instagram.com/disnakkeswanlampung](https://www.instagram.com/disnakkeswanlampung))



Gambar 12. Tampilan Instagram Disnakkeswan

4. YouTube ([youtube.com/channel/UCQIibYKsZVn5XqyePVBGy9w](https://www.youtube.com/channel/UCQIibYKsZVn5XqyePVBGy9w))



Gambar 13. Tampilan Youtube Disnakkeswan

3. Papan Informasi

Sebagai media yang memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban, tata cara, dan alur permintaan Informasi Publik serta memuat informasi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan yang dijalankan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.

## **G.Kendala Layanan Informasi Publik**

### 1. Internal

- a. Kurangnya kapasitas dan pemahaman tugas pokok dan fungsi masing-masing sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan informasi;
- b. Interpretasi SOP belum dijalankan secara maksimal;
- c. Sarana dan prasana yang masih belum memadai;
- d. Belum tersedianya ruang khusus untuk melayani pemohon informasi;
- e. Belum adanya dukungan anggaran secara khusus untuk pelaksanaan PPID.

### 2. Eksternal

Kurangnya sosialisasi terhadap tugas dan fungsi PPID Pelaksana sehingga dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik belum sesuai SOP yang ada, para pemohon informasi kerap kali mendatangi bidang/UPTD tertentu yang seharusnya bisa datang langsung ke unit layanan informasi publik.

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Pengelolaan informasi dan dokumentasi publik oleh PPID Pelaksana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung sudah terlaksana cukup baik. Terdapat 130 permohonan informasi yang dapat dikabulkan. Tersedianya sarana penunjang pelayanan informasi berupa website, media sosial, dan papan informasi yang memuat informasi yang wajib disediakan serta informasi yang diumumkan secara berkala. Tidak adanya permohonan informasi publik yang ditolak karena tidak termasuk ke dalam kategori dikecualikan. Namun demikian masih banyak yang perlu ditingkatkan untuk menyediakan pelayanan informasi publik yang lebih baik.

### **B. Saran**

Saran dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pelayanan informasi yang baik, maka perlu dilaksanakan bimbingan teknis di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung;
2. Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Database Informasi;
3. Penambahan SDM pengelola layanan informasi;
4. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi;
5. Perlu adanya anggaran khusus untuk PPID.

## DAFTAR LAMPIRAN

### 1. Surat Keputusan (SK) PPID Pelaksana



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
Jalan : Cut Meutia No 23 B Telp 0721 487310 – 487311 Fax 0721 481440  
**BANDAR LAMPUNG**  
Kode Pos : 35214

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR : 188/220/V.23 / A.3 / 2021**

#### T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG**

- Menimbang** : a. Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.  
b. Bahwa sehubungan dengan huruf (a) tersebut diatas dan agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar, efektif dan terkoordinasi, dipandang perlu menyusun Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Memperhatikan** 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;  
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021
- Kesatu** : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 (satu) keputusan ini.
- Kedua** : Struktur Organisasi PPID Pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 (dua) keputusan ini;
- Ketiga** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
  2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung menjadi bahan informasi publik dan
  6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- Keempat** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 30 Juni 2021

KEPALA DINAS,



**Ir. Lili Mawarti, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670426 199203 2 003

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Provinsi Lampung

Nomor : 188 /122.4/ V.23 / A.3 / 2021

Tanggal : 30 Juni 2021

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PEMBANTU DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

No	Jabatan dalam Tim PPID	Nama / Jabatan
	Atasan PPID	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
	Ketua PPID	Sekretaris
	Sekretaris PPID	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
I	Pengelola Data dan Informasi	
	Koordinator	Kepala Sub Bagian Perencanaan
	Anggota	1. Christabel Fitrianie Sutamba, S.Pt 2. Yayan Makmun Midyana
II	Pelayanan Dokumentasi	
	Koordinator	Mahbub Abdul Fatah, S.Pt., MM
	Anggota	1. Abdurahman Ath Thoifi, S.Pt 2. Drh. Nadia Prainty 3. Gesa Gustami Pangesti, S.Si. 4. Gita Siamtiningrum S.Pt 5. Ismi Khomsiah S.Si 6. Dian Subekti Rahayu S.Si 7. Nawang Ayu Jatiningtyas S.Pt 8. drh. Elisabet Masnawaty Sinaga Barutu 9. drh. Joko Susilo

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 30 Juni 2021

KEPALA DINAS,



**Ir. Lili Mawarti, M.Si**

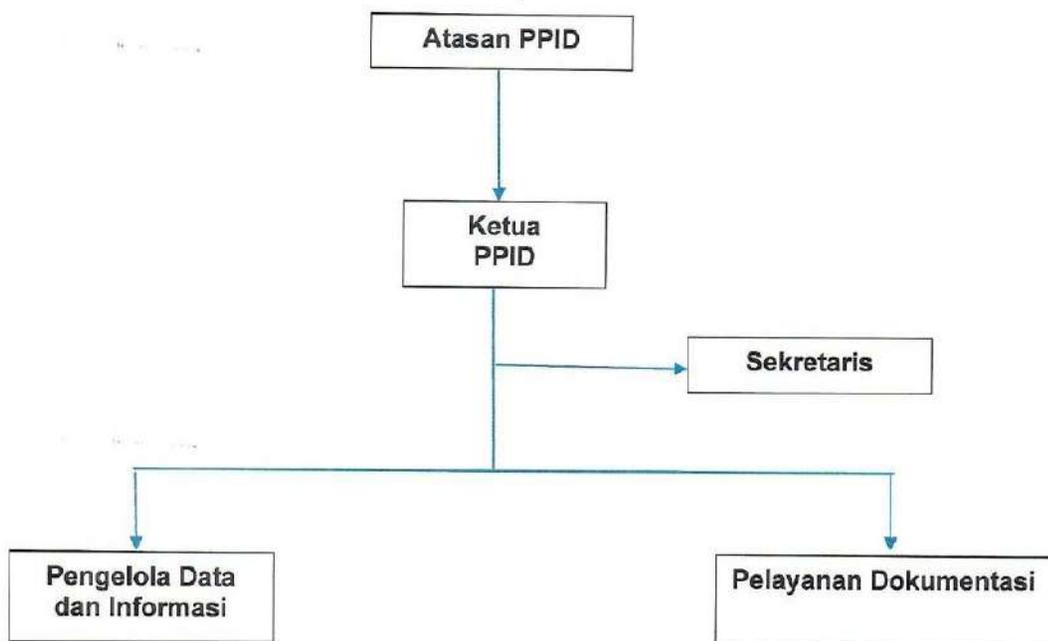
Pembina Tingkat I

NIP. 19670426 199203 2 003

## 2. Struktur Organisasi

Lampiran 2 : Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Provinsi Lampung  
Nomor : 188 /122.6/ V.23 / A.3 / 2021  
Tanggal : 30 Juni 2021

### STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021



Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 30 Juni 2021

KEPALA DINAS,



Ir. Lili Mawarti, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670426 199203 2 003

### 3. Foto dan Dokumentasi



Gambar 14. Pelayanan Informasi untuk Mahasiswa/Akademisi



Gambar 15. Pelayanan Informasi untuk Badan Publik Lainnya

## 4. SPT Admin PPID Pelaksana



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
 Jl. Cut Meutia No. 23 B Gulak Galik Kec. Teluk Betung Utara  
**BANDAR LAMPUNG**

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor: 800/1229 /SPT/V.23/A.3/2021

Dasar : Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Nomor: 188/122.a/V.23/A.3/2021 Tanggal 30 Juni 2021 Tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 2021.

**MEMERINTAHKAN :**

Kepada :

1. Nama	:	Mahbub Abdul Fatah, S.Pt., MM
Pangkat/Golongan	:	Penata (III/c)
NIP	:	19830205 201101 1 002
Jabatan	:	Admin PPID Pembantu
2. Nama	:	Abdurahman Ath Thoifi, S. Pt
Pangkat/Golongan	:	Penata Muda (III/a)
NIP	:	19960822 202012 1 012
Jabatan	:	Admin PPID Pembantu

Untuk :

- Melakukan pengumpulan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung;
- Melakukan koordinasi dengan tim media sosial dari masing-masing bidang dan UPTD;
- Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama Provinsi Lampung secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Tugas ini agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 30 Juni 2021

KEPALA DINAS,

  
I. LILI MAWARTI, M. Si.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19670426 199203 2 003